

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Appeldoorn, L.J. Van, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-18, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rienika Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fajar, Mukhti., Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indrastuti, Lusia, Susanto Polamolo, 2013, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan*, Total Media, Yogyakarta.
- Iver, Mac, 1955, *The Modern State*, First Edition, Oxford University Press, London.
- Mahfud MD, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Marzuki, P. Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, R. Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tutik, T. Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yusa, I Gede, Ni Ketut Sri Utari, Gede Marhaendra Wija Atmaja, I Nengah Suantra, Komang Pradnyana Sudibya, Made Nurmawati, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Made Ari Yulianti Griadhi, Nyoman Mas Aryani, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945*, Setara Press, Malang.

B. Artikel

Ismail, Kiki, 2015, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019*, Tamaddun Volume XV Nomor 1, Program Studi Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Lijpart, Arend, 1990, “*The Political Consequences of Elctoral Laws*,” The American Political Science Review, June, Volume 84, Issue 2, American Political Science Association, Washington DC.

Mahfud MD, Moh., 2007, *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah*, Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 14.

Patria, Ahmad Riza, *Menuju Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas (Partai Besar vs Partai Kecil)*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Perludem, *Konversi Suara Menjadi Kursi*, Siaran Pers, Jakarta.

Triono, 2017, *Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Wacana Politik, Volume 2 nomor 2, Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Lampung.

C. Internet

Kusnu Goesniadhie S., “Demokrasi dalam Konsep dan Praktek”, <https://kgsc.wordpress.com/demokrasi-dalam-konsep-dan-praktek/>, diakses 5 Desember 2020.

Komisi Pemilihan Umum, “Penetapan Hasil Pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019”, diakses dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/penetapan-hasil/wilayah/> pada Februari 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Lain-lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016, *Risalah Rapat Kerja Ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, *Risalah Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pemilihan Umum*.

Kementerian Dalam Negeri, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.